

# **LAPORAN**

**KUNJUNGAN KERJA KOMISI IX DPR RI  
KE PROVINSI SULAWESI UTARA**

**RESES MASA PERSIDANGAN I  
TAHUN SIDANG 2019 – 2020**

**TANGGAL 18 - 22 DESEMBER 2019**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
JAKARTA, DESEMBER 2019**



**LAPORAN  
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IX DPR RI  
KE PROVINSI SULAWESI UTARA  
PADA RESES MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2019 – 2020  
TANGGAL 18 - 22 DESEMBER 2019**

---

**I. PENDAHULUAN**

*A. Latar Belakang*

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, yang merupakan salah satu fungsi yang dimiliki oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR RI mengawasi berbagai kebijakan dan program yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Pemerintah.

Oleh karena itu, ketentuan Pasal 58 ayat (4) huruf f Peraturan Tata Tertib DPR-RI menyatakan bahwa salah satu kegiatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan DPR-RI adalah melalui kunjungan kerja. Untuk itu, Komisi IX DPR-RI dalam Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2018-2019 memutuskan untuk melakukan kunjungan kerja ke 3 (tiga) Provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam pelaksanaan kunjungan kerja, Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan, pengawasan obat dan makanan, dan jaminan kesehatan, mengharapkan mendapatkan masukan secara langsung, baik dari Pemerintah Daerah, mitra kerja maupun masyarakat umum tentang realisasi program dan anggaran yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat/APBN dan juga untuk memonitor pelaksanaan Program-Program Instansi/Badan mitra kerja Komisi IX DPR RI di daerah tujuan kunjungan kerja. Selain itu, kunjungan kerja juga bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait proses legislasi dan perumusan kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan bidang tugas Komisi IX DPR RI. Hasil kunjungan kerja akan menjadi bahan pembahasan dengan kementerian terkait dan mitra kerja lainnya.

*B. Dasar Kegiatan*

1. Keputusan Pimpinan DPR-RI tentang Penugasan kepada Anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI untuk melakukan kunjungan kerja berkelompok dalam Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020.
2. Keputusan Rapat Intern Komisi IX DPR RI pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020.

### C. Maksud dan Tujuan

1. Menjalankan fungsi pengawasan DPR terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam lingkup tugas Komisi IX DPR RI.
2. Menggali informasi realisasi program dan anggaran yang dibiayai APBN.
3. Memetakan permasalahan masyarakat dan memonitor pelaksanaan program Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi IX DPR RI di Provinsi Sulawesi Utara.
4. Menyerap aspirasi masyarakat Provinsi Sulawesi Utara terkait proses legislasi dan perumusan kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan bidang tugas Komisi IX DPR RI.

### D. Peserta Kunjungan Kerja

Adapun susunan lengkap anggota rombongan Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI ke Provinsi Sulawesi Utara sebagai berikut: **(minta tolong ya mas)**

NO URUT	N A M A	JABATAN	FRAKSI
1.	FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E	KETUA TIM/ KETUA KOMISI IX DPR RI	F-NASDEM
2.	RAHMAD HANDOYO, S.PI, MM	ANGGOTA	F-PDIP
3.	MUCHAMMAD NABIL HAROEN, S.Pd	ANGGOTA	F-PDIP
4.	Drs. H. DARUL SISKA	ANGGOTA	F-GOLKAR
5.	Hj. SANIATUL LATIVA, SE	ANGGOTA	F-GOLKAR
6.	Dra. WENNY HARYANTO, SH	ANGGOTA	F-GOLKAR
7.	dr. H. SUIR SYAM, M.Kes, MMR	ANGGOTA	F-GERINDRA
8.	Dra. Hj. RUSKATI ALI BAAL	ANGGOTA	F-GERINDRA
9.	Hj. SRI KUSTINA	ANGGOTA	F-NASDEM
10.	drg. Hj. HASNAH SYAM, MARS.	ANGGOTA	F-NASDEM
11.	H. HARUNA, MA, MBA	ANGGOTA	F-PKB
12.	Hj. ALIYAH MUSTIKA ILHAM, SE	ANGGOTA	F-DEMOKRAT
13.	MUHAMMAD DHEVY BIJAK	ANGGOTA	F-DEMOKRAT
14.	dr. H. ADANG SUDRAJAT, MM, Av	ANGGOTA	F-PKS
15.	MESAKH MIRIN, SKM	ANGGOTA	F-PAN
16.	RUDYANTO	SEKRETARIAT KOMISI IX	
17.	DENI LESTARI	SEKRETARIAT KOMISI IX	
18.	BOYKE AGUNG BUDI DARMAWAN	SEKRETARIAT KOMISI IX	
19.	FITRIANA YULIAWATI LOKOLLO	TENAGA AHLI BIDANG KESEHATAN KOMISI IX DPR RI	
20.	DENY FITRIADI	TENAGA AHLI BIDANG KETENAGAKERJAAN KOMISI IX DPR RI	
21.	TEGUH BIANTORO	TV PARLEMEN	
22.	NAEFUROJI, S. Sos	PEMBERITAAN	

### III. OBJEK YANG DIKUNJUNGI

1. Peninjauan ke RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou
2. Peninjauan ke BLK Bitung

### IV. HASIL PELAKSANAAN KUNJUNGAN

#### 1. Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Utara



### Gambar 1. Peta Provinsi Sulawesi Utara

Provinsi Sulawesi Utara adalah suatu daerah yang terletak di paling utara pulau Sulawesi dengan Ibukota Manado. Provinsi yang dihuni oleh suku terbesar yang berasal dari Minahasa, Sulawesi Utara atau Sulut ini berbatasan dengan Laut Maluku dan Samudera Pasifik di sebelah timur, Laut Maluku dan Teluk Tomini di sebelah selatan, Laut Sulawesi dan provinsi [Gorontalo](#) di sebelah barat, dan provinsi [Davao del Sur \(Filipina\)](#) di sebelah utara.

Provinsi Sulawesi Utara mempunyai 15 (lima belas) Kabupaten kota yakni Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Bitung, Kota Kotamobagu, Kota Manado dan Kota Tomohon.

Berdasarkan situs <https://sulut.bps.go.id/> jumlah penduduk Provinsi Sulut tahun 2019 adalah 2.641.884 jiwa yang terdiri dari 1.347.803 laki-laki dan 1.294.081 perempuan dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,2 persen. Jumlah penduduk miskin Provinsi Sulawesi Utara per bulan Maret 2019 sebesar 191.700 jiwa (Bappeda Provinsi Sulut, 2019).

#### a. Gambaran Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara

- Prosentase APBD untuk kesehatan TA .....
- Tahun 2019 Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah mengalokasikan dana sebesar Rp24,5 Milyar untuk mendaftarkan masyarakat sebanyak 170.845 jiwa ke dalam peserta program JKN.
- Jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN tahun 2018 di Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 768.001 jiwa dan PBI APBD sebanyak 875.485 jiwa.
- Jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 836.502 jiwa dan PBI APBD sebanyak 795.173 jiwa.
- Rencana strategis pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk memenuhi kebutuhan fasilitas kesehatan dan SDM Kesehatan yaitu dengan pembangunan RS daerah tipe B Provinsi Sulawesi Utara dan meningkatkan kualitas SDM di bidang kesehatan dengan mengadakan berbagai pelatihan kesehatan.
- Jumlah RS yang ada di Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 47 buah yang terdiri dari 20 RS daerah, 20 RS swasta, dan 7 RS vertikal kementerian/angkatan. Dari 47 RS tersebut terdapat 40 buah yang sudah terakreditasi KARS.
- Total kelas III di Provinsi Sulut sebesar 39%.
- RSUP Prof. Kandou merupakan pusat rujukan di Provinsi Sulawesi Utara dan memiliki pelayanan yang baik terutama merupakan salah satu pusat pelayanan kanker dan jantung untuk wilayah Indonesia Timur

- Jumlah puskesmas di Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 197 puskesmas, 425 buah puskesmas pembantu, 139 buah puskesmas keliling, 359 buah polindes/poskesdes.
- Terdapat 1 RSJ yaitu Prof V.L. Ratumbuisang
- Setiap puskesmas punya pemegang program di bidang kesehatan jiwa. Yang menjadi masalah adalah di puskesmas saat ini tidak memiliki obat untuk miner triagulizer.
- Masih kurangnya tenaga kesehatan tertentu terutama tenaga promotive dan preventif.
- Terdapat disparitas terhadap penyebaran tenaga kesehatan di kabupaten/kota dimana penyebarannya tidak merata yaitu para tenaga kesehatan seperti dokter, dokter gigi, dokter spesialis yang hanya terpusat pada daerah perkotaan.
- Terdapat permasalahan dalam pengelolaan ketersediaan obat yaitu permasalahan dalam e-catalog, penyedia yang sudah kontrak paying dengan LKPP tidak dapat memenuhi pemesanan (cut off), penyedia menentukan batasan jumlah pemesanan obat sehingga tidak terpenuhi jika tidak sesuai dengan batasan tersebut, serta distributor tidak menandatangani kontrak.

#### **b. Gambaran Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Utara**

1. Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Utara selang 3 tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat baik. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Angka Pengangguran mengalami penurunan yang signifikan dari Tahun 2017-2019, di mana TPT pada tahun 2017 sebesar 7,18 persen menurun menjadi 6,25 persen pada Tahun 2019, sedangkan Angka Pengangguran dari 80,4 ribu orang pada tahun 2017 turun menjadi 75,4 ribu orang pada Tahun 2019.

JENIS KEGIATAN UTAMA	SATUAN	2017	2018	2019
		Agt	Agt	Agt
1. Penduduk Usia Kerja	Orang	1.842.800	1.866.055	1.889.885
2. Angkatan Kerja	Orang	1.121.309	1.175.809	1.207.006
- Bekerja	Orang	1.041.826	1.095.145	1.131.521
- Pengangguran	Orang	80.483	80.664	75.485
3. Bukan Angkatan Kerja	Orang	721.000	690.246	682.879
- Sekolah	Orang	161.000	143.337	152.296
- Mengurus Rumah Tangga	Orang	458.000	441.804	432.982
- Lainnya	Orang	102.000	105.105	97.601
4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	7,18	6,86	6,25
5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	60,85	63,01	63,87

*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Utara, Agustus 2017-2019*

- Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama, penduduk Sulawesi Utara paling banyak bekerja pada sektor pertanian. Diikuti oleh sektor perdagangan dan jasa.
  - Status pekerja di Sulawesi Utara masih didominasi oleh buruh/karyawan, yaitu sekitar 40% dari total pekerja.
  - Kualitas pekerja di Sulawesi Utara diukur dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan masih tergolong rendah, yakni sebagian besar pekerja berpendidikan rendah (tamam SMP ke bawah). Sementara untuk pekerjaan pendidikan menengah (SMA sederajat) ada sekitar sepertiga dari total pekerja, dan presentase terkecil adalah mereka yang berpendidikan tinggi (Diploma/Sarjana).
2. Langkah yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam menyikapi Data BPS Tahun 2018 terkait penduduk yang bekerja di Sulut masih didominasi tamatan SMP, SD kebawah dengan
    1. Memberikan pelatihan atau keterampilan gratis bagi masyarakat terutama bagi lulusan SMA/SMK maupun Perguruan Tinggi sehingga dapat kompeten/memiliki keahlian/skill dan siap pakai untuk memasuki dunia usaha ataupun dunia industri.
    2. Telah dibuat MOU antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara bagi siswa SMK kelas 11 dan 12 untuk difasilitasi dalam program pemagangan di perusahaan sesuai kejurumannya.
    3. Dengan program pemagangan dalam negeri dan luar negeri khususnya bagi tamatan SMA/SMK dan Perguruan Tinggi.
  3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Utara saat ini antara lain:
    - a. Alokasi anggaran pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara baik APBD maupun APBN setiap tahunnya tidak mengalami penambahan bahan cenderung berkurang.
    - b. Perlu adanya penambahan tenaga fungsional teknis ketenagakerjaan baik instruktur, pengawas ketenagakerjaan, mediator, dan pengantar kerja, karena banyak yang telah memasuki purna tugas.
    - c. Perlu adanya upgrading skill/sertifikasi dari fungsional ketenagakerjaan yang sudah ada.
    - d. Penambahan dan revitalisasi sarana dan prasarana baik dibalai pelatihan tenaga kerja maupun balai pengawasan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha/dunia industry saat ini.
    - e. Belum semua Kabupaten/Kota di Sulut memiliki lembaga latihan kerja.
    - f. Pemberdayaan lembaga pelatihan kerja swasta untuk dijadikan mitra untuk dalam program pelatihan keterampilan untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten.
  4. Jumlah pegawai pengawas yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 41 pegawai pengawas yang memiliki legitimasi dari Kementerian Ketenagakerjaan RI, sedangkan pegawai pengawas yang sudah diangkat dalam jabatan fungsional pegawai pengawas berjumlah 37 orang yang terbagi di dua unit kerja pengawasan ketenagakerjaan yaitu:
    - a. Bidang pengawasan ketenagakerjaan berjumlah 24 orang PP
    - b. Balai pengawasan tenaga kerja berjumlah 13 orang PP.
  5. Objek pengawasan ketenagakerjaan berdasarkan jumlah badan usaha yang ada di Sulawesi Utara berjumlah 62.000 badan usaha dengan kualifikasi besar, sedang/menengah, dan kecil. Berdasarkan ratio yaitu:

- a. Ratio kebutuhan pegawai pengawas ketenagakerjaan “1 orang pengawas idealnya mengawasi 5 perusahaan dalam satu bulan”.
- b. Jumlah kebutuhan pengawas:

$$\begin{aligned} \text{Jumlah pengawas KK} &= 62.000 / 5 \text{ perusahaan} \times 12 \text{ bulan} \\ &= 101 \text{ orang.} \end{aligned}$$

- c. Jumlah kebutuhan pengadaan pegawai pengawas ketenagakerjaan:

$$101 \text{ orang} - 37 \text{ orang} = 64 \text{ orang.}$$

6. Terkait kunjungan kerja Komisi IX pada bulan Mei 2019 yang lalu, didapati bahwa masih terbatasnya tenaga teknis fungsional ketenagakerjaan antara lain pegawai mediator hubungan industrial, instruktur pelatihan, pegawai pengawasan ketenagakerjaan spesialis, serta pegawai pengantar kerja. Namun saat ini, sudah ada upaya perbaikan untuk mengatasi keterbatasan tenaga fungsional ketenagakerjaan di atas, yaitu dengan memberi kesempatan kepada pegawai di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk mengikuti diklat teknis fungsional ketenagakerjaan RI, tapi sangat sedikit pegawai yang berminat mengikuti diklat teknis dimaksud karena pertimbangan usia dan keluarga. Selanjutnya telah diusulkan ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai formasi tenaga teknis fungsional ketenagakerjaan dimaksud.

## **BALAI LATIHAN KERJA**

Pada kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke Sulut tanggal 2 Mei 2019 yang lalu, dikatakan bahwa:

- a. BLK masih terkendala dengan peralatan yang sudah tidak memadai untuk menunjang kegiatan workshop karena harus disesuaikan dengan kebutuhan pelatihan serta kemajuan teknologi saat ini. Sebagian besar peralatan yang ada di workshop sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pelatihan dan kemajuan teknologi yang ada serta tidak sesuai dengan rasio jumlah siswa terhadap peralatan. Apalagi saat ini kita harus menyesuaikan dengan Revolusi Industri 4.0 yang membutuhkan keahlian untuk menguasai dimensi kompetensi yaitu:
  1. Task Skill : Melaksanakan tugas individu.
  2. Task Management Skill : Mengelola sejumlah tugas yang berbeda dalam satu pekerjaan.
  3. Contingency Management Skill : Kemampuan merespon dan mengelola kejadian dan masalah
  4. Job/Role Environment Skill : Kemampuan menyesuaikan dengan tanggung jawab dan harapan lingkungan kerja.
  5. Transfer Skill : Kemampuan beradaptasi dengan lingkungan maupun alat yang baru

Upaya yang telah dilakukan:

1. Pelatihan berbasis kompetensi tetap kamu laksanakan sesuai dengan program pelatihan yang ada, dengan memaksimalkan penggunaan peralatan yang ada saat ini.
2. Melakukan perbaikan terhadap beberapa peralatan workshop dan penambahan fasilitas pada workshop Las, menggunakan anggaran yang tertata dalam APBD TA. 2019.
3. Pada saat pelaksanaan materi wawasan industry, siswa diperkenalkan dengan peralatan terkini di perusahaan sebagai lokus kunjungan sesuai kejuruan masing-masing namun jam pelatihan terbatas.
4. Melaksanakan On The Job Training atau Pelatihan di Tempat Kerja sebagai bagian dari mekanisme pelatihan sekaligus memperkenalkan dunia kerja yang sesungguhnya termasuk peralatan.

5. Menjalin kerja sama dengan beberapa perusahaan untuk menyediakan lokasi mgang bagi siswa setelah selesai mengikuti pelatihan dengan mendapatkan fasilitas yang cukup dari perusahaan.
  6. Gubernur Sulawesi Utara telah menyampaikan proposal ke Menteri Ketenagakerjaan RI sejak tahun 2017, 2018, dan 2019 namun belum terealisasi.
- b. Jumlah instruktur yang semakin berkurang serta tidak diimbangi dengan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dasar bagi yang berminat untuk menjadi instruktur. Hal ini benar adanya bahwa instruktur semakin berkurang. Sejak tahun 2018 sudah 3 instruktur yang sudah pensiun dan instruktur yang ada sekarang berturut-turut akan memasuki masa pensiun. Disnaker pernah mengusulkan untuk diberikan kesempatan bagi ASN yang berminat untuk mengikuti Diklat Dasar Calon Instruktur, namun belum terakomodir, mengingat meningkatnya peminat peserta pelatihan ini.
  - c. Berkurangnya kesempatan bagi instruktur untuk mengembangkan diri (bimtek dan upgrading). Ini terjadi pada tahun 2019 beberapa kali mendapatkan kesempatan mengikuti Bimtek, namun diperuntukkan bagi tenaga pelatihan. Sedangkan upgrading bagi instruktur masih terbatas sementara instruktur harus segera menyesuaikan dengan perubahan teknologi dan kebutuhan pasar kerja.
  - d. Belum memadainya sarana serta prasarana asrama untuk menampung siswa dari luar daerah karena target peserta pelatihan adalah seluruh Provinsi Sulawesi Utara. Gubernur Sulawesi Utara telah mengirimkan Proposal bantuan Rumah Susun Sewa kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI yang telah disetujui dan pada awal tahun 2020 akan dibangun Rumah Susun tipe 24 berisi 36 kamar beserta fasilitas di dalamnya yakni tempat tidur, kasur, dan lemari 3 set per kamarnya, yang akan difungsikan sebagai asrama siswa pelatihan.

#### **BPJS Ketenagakerjaan di Sulawesi dan Maluku**

1. Keadaan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dalam 3 tahun terakhir mengalami peningkatan, dengan ditandai dengan total tenaga kerja aktif sektor penerimaan upah, bukan penerima upah, dan jasa konstruksi yang sudah mencapai 370.714.
2. Tingkat kepatuhan perusahaan/pemberi kerja dalam pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan di wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi-Maluku berjalan dengan baik, hal ini tidak terlepas dari peran aktif mitra strategis yakni Kejaksaan Tinggi, KPKNL, dan juga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sehingga mampu menagih piutang iuran sebesar Rp. 63.343.003.555.
3. Monitoring dan evaluasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan telah dilakukan secara berjenjang, dimulai dari tingkat terbawah unit kerja, yakni Kantor Cabang Perintis, di mana evaluasi didasarkan pada Key Performance indicator dan dilakukan juga Monev di tingkat cabang serta wilayah dengan mengadakan pertemuan rutin untuk membahas rencana kerja strategis dalam implementasi jaminan social ketenagakerjaan di lapangan.
4. Terkait pembangunan taman kota Manado yang berasal dari dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) BPJS Ketenagakerjaan, belum ada pembangunan dan tidak ada rencana kerja taman kota di Manado yang berasal dari dana TJSL.

#### **V. REKOMENDASI**

1. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan untuk terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait pemerataan tenaga kesehatan di FKTP dan FKRTL di Povinsi Sulawesi Utara.



2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan agar memperhatikan dan memprioritaskan pemenuhan sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia Kesehatan di Provinsi Sulawesi Utara.
3. Komisi IX DPR RI mendesak kepada BPJS Kesehatan agar meningkatkan cakupan kepesertaan terutama dari peserta non PBI serta mensosialisasikan dan mendiskusikan pengintegrasian jamkesda ke dalam BPJS bersama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
4. Komisi IX DPR RI mendesak kepada BKKBN untuk menambah Petugas Lapangan KB (PLKB) di Provinsi Sulawesi Utara mengingat cakupan wilayah pengawasannya sangat luas.
5. Komisi IX DPR RI meminta kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk bisa mengakomodir pelatihan Diklat Dasar Calon Instruktur dari BLK Bitung untuk penambahan dan regenerasi instruktur, karena saat ini rata-rata yang menjadi instruktur adalah pegawai yang sudah pensiun.
6. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk menindaklanjuti kemungkinan mengganti peralatan yang sudah tidak memadai untuk menunjang kegiatan workshop pada BLK-BLK di Sulawesi Utara yang berasal dari APBN mengingat permohonan kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI sudah diajukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sejak dari tahun 2017 sampai dengan 2019.
7. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Ketenagakerjaan untuk lebih meningkatkan kepesertaan terutama bagi pekerja Bukan Penerima Upah dan lebih intens lagi untuk mensosialisasikan BPJS Ketenagakerjaan pada masyarakat di Sulawesi Utara dan Manado khususnya dengan bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara serta pihak-pihak terkait lainnya.

## **VI. PENUTUP**

Demikian laporan kunjungan kerja Komisi IX DPR-RI ke Provinsi Sulawesi Utara pada Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2018 – 2019 yang telah dilaksanakan mulai tanggal 13 – 17 Februari 2018. Laporan ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah dalam upaya untuk meningkatkan dan menyempurnakan pelaksanaan program pemerintah di daerah di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan khususnya di Provinsi Sulawesi Utara.

Atas segala bantuan dan kerjasama yang baik dari mitra kerja Komisi IX DPR-RI, Pemerintah Daerah, para Kepala Dinas, dan Instansi terkait serta khususnya masyarakat setempat yang telah membantu kelancaran selama Kunjungan Kerja Tim Komisi IX DPR RI di Provinsi Sulawesi Utara, kami ucapkan terima kasih.

JAKARTA, DESEMBER 2019  
KETUA TIM KUNKER

**FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E**  
**A-393**

